

BAB II

KEBIJAKAN MILITER RUSIA

Keamanan dan pertahanan merupakan sektor yang paling penting dalam suatu negara untuk melindungi kedaulatannya. Sistem keamanan dan pertahanan yang baik tentunya akan berdampak positif dalam menjaga keberlangsungan hidup bernegara dari berbagai serangan negara lain. Sebagaimana yang dinyatakan Hans J. Morgenthau bahwa kesiagaan militer memerlukan pranata militer yang mampu mendukung politik luar negeri yang ditempuh. Kemampuan itu diperoleh dari sejumlah faktor dan yang terpenting diantaranya, inovasi teknologi, kepemimpinan, dan kuantitas maupun kualitas angkatan bersenjata (Thompson, 2010). Hal ini lah yang juga diperhatikan oleh negara Rusia. Republik Federasi Rusia dalam perjalanannya memiliki sejarah yang erat dengan keamanan dan pertahanan. Mengingat, Rusia kala itu pernah ikut terlibat dalam Perang Dunia. Dan hingga kini sisa-sisa persenjataan masih eksis dan justru dikembangkan lebih lanjut. Selain itu juga, anggaran militer pun kian ditingkatkan seiring meningkatnya perekonomian Rusia.

Keamanan dan pertahanan sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi suatu negara. Jika kondisi ekonomi yang stagnan tentunya membawa dampak pada melemahnya sistem keamanan dan pertahanan. Karena sistem keamanan dan pertahanan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bahkan bisa dibilang bahwa dana terbesar yang dikeluarkan oleh suatu negara ialah untuk keamanan dan pertahanan.

Pada bab ini, penulis akan menulis mengenai gambaran umum mengenai kebijakan militer Rusia. Mulai dari profil, orientasi, dan tujuan dari kebijakan militer Rusia.

A. Gambaran Umum Kebijakan Militer Rusia

Pasca runtuhnya Uni Soviet, federasi Rusia seakan melupakan sejenak mengenai pertahanan militernya. Hal ini dikarenakan diawal pemerintahan Rusia yang berada dibawah

kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia fokus membenahi sektor ekonominya. Layaknya negara baru, Rusia dapat dikatakan masih tidak berdaya dan belum bisa berdiri sendiri. Kemunduran angkatan bersenjata Rusia tersebut disebabkan karena ketidakmampuan pemerintahan Boris Yeltsin dalam membiayai modernisasi peralatan militernya, ketidakmampuan dalam menggaji sumber daya manusia yang bekerja di angkatan bersenjata dan industri senjata Rusia, serta ketidakmampuan dalam menciptakan sebuah inovasi teknologi khususnya alutista (Fahrudji, Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budaya, 2005).

Pasca mundurnya Yeltsin dan majunya Vladimir Putin sebagai presiden, Rusia merubah haluan kebijakannya untuk kembali fokus terhadap pengembangan pertahanan militernya. Dengan pengaruh Putin, Rusia seakan bangkit lagi untuk menguatkan militernya dan dijadikan sebagai kepentingan nasional Rusia. Hal ini dilakukan karena Putin melihat bahwa ketergantungan asing di era Yeltsin tidak membawa dampak yang signifikan kepada Rusia. Alhasil, Putin ingin mengembalikan kejayaan Rusia lagi.

Table 1 Russia's Military: Power and Policy (*Trenin S. E., 2004*)

August 1991 – December 1993	Military coup	Consolidation of Yeltsin's regime	Confrontatio n in Moscow	Withdrawals, downsizing, peacemaking
January 1994 – September 1996	Parliamentary elections	Yeltsin's re- election	War in Chechnya	Fighting, peacekeeping
October 1996 – September 1999	Peace in Chechnya	Struggle for succession	Financial meltdown	Restructuring, peacekeeping
October 1999	Invasion of	Consolidation	War in	Fighting,

- present	Chechnya	of Putin's regime	Chechnya	Projecting power
-----------	----------	----------------------	----------	------------------

Diawali dengan pemulihan politik, Putin mulai membenahi institusi-institusi di Kremlin. Diikuti dengan sistem perekonomian yang menerapkan nasionalis dan liberalis. Putin kembali menghidupkan kekuatan sentralisasi, termasuk penguatan keamanan dan pertahanan. Terlebih latar belakang Putin ialah intelejen KGB. Tetapi penguatan keamanan dan pertahanan yang dilakukan Putin juga disinkronisasi dengan pulihnya perekonomian terlebih dahulu. Setelah politik dan ekonomi stabil, kemudian ia baru memfokuskan pada pengembangan keamanan dan pertahanan. Hal ini dilakukan karena kemandirian dan pertahanan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan Rusia pada era pemerintahan Putin menunjukkan keberhasilannya dalam pertumbuhan sektor ekonominya. Hal itu ditandai dengan lunasnya hutang Rusia ke IMF sebesar USD 40 miliar. Rusia di bawah Putin berada di peringkat ke 22 pada tahun 1999. Kemudian naik ke ranking 10 pada tahun 2006 (Sunaryono, 2012). Maka dari itu, ekonomi yang stabil mampu dijadikan sebagai penopang keamanan dan pertahanan Rusia.

Rusia di era 1999 hingga sekarang, dibawa menjadi negara yang memiliki karakteristik yang kuat. Karena baginya, kekuatan militer merupakan salah satu instrumen kekuatan dikancah internasional. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya doktrin militer yang secara resmi diumumkan pada tahun 1990. Tetapi kemudian baru disetujui pada 2014 yang lalu. Selain itu, ditandai dengan peningkatan anggaran militer Rusia.

Dengan kekuatan baru dalam sistem kemandirian dan pertahanan, Rusia di era Vladimir Putin menunjukkan eksistensi negara Rusia di dunia internasional. Kacamata internasional akan melihat Rusia sebagai negara kuat seperti sedia kala. Berkat figur Vladimir Putin, kekuatan nasional Rusia juga kembali menguat. Dari situ, tidak heran jika sosok Vladimir

Putin sangat dikagumi dan disegani oleh masyarakat Rusia. Karena dia dianggap sosok yang sanggup mengembalikan wibawa Rusia yang menjadi pewaris kerajaan Byzantium, Imperium Rusia Raya, dan Uni Soviet. Sejarah yang kuat melekat pada negara ini, sehingga apa yang dicapai Putin setidaknya merupakan suatu kemajuan yang mengingatkan masyarakat Rusia akan jati diri berdasarkan historis tersebut.

Kemandirian ekonomi yang dilakukan Putin memang bertolak belakang dengan pendahulunya, Yeltsin. Kemandirian ekonomi juga menggiring Rusia ke arah pengaktifan kembali industri militer dan senjata. Putin yakin bahwa keamanan dan pertahanan Rusia bisa mandiri secara penuh. Agar tujuan bisa dicapai, maka perlu memfokuskan terhadap kualitas, harga dan ketepatan waktu pembuatan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan pihak Rusia tidak munafik dengan adanya sanksi tidak akan memberikan pengaruh pada Rusia. Lavrov menegaskan sanksi embargo senjata mungkin akan memberikan sedikit guncangan bagi Rusia, namun sanksi juga bisa menjadi lecutan bagi Rusia untuk mandiri. Dengan kemandirian, menurut Putin, Rusia tidak akan bergantung dan mudah dijatuhkan oleh negara lain.

Tak bisa dielakkan, semua kebijakan yang dilakukan Putin berlandaskan rasa nasionalis dalam diri Putin. Selain rasa nasionalis tersebut, adanya pengaruh eksternal yang membuat kebijakan penguatan sistem keamanan dan pertahanan semakin ditingkatkan. Hal ini tidak terlepas dengan hadirnya Amerika Serikat yang semakin mendominasi dunia pasca Perang Dingin. Terlebih munculnya negara superpower baru seperti China. Bagi Rusia, siapapun bisa menjadi ancaman selama negara lain menghalangi kepentingannya. Walaupun di satu sisi, Rusia tidak menganggap musuh secara utuh. Layaknya Amerika Serikat, walaupun terkadang dikatakan sebagai rival dan sering bersitegang dalam beberapa konflik, entah secara langsung maupun tidak, mereka tetap melakukan berbagai kerjasama. Tetapi bagi Rusia, kerjasama yang dilakukan Rusia dengan Amerika Serikat bukan berarti

Rusia bergantung pada Amerika Serikat seperti negara lain. Justru, keduanya saling membutuhkan satu sama lain, seperti dalam kerjasama melawan terorisme internasional.

Bagi Rusia, dunia saat ini berada dalam kekuatan multipolar. Beda halnya dengan perspektif Amerika Serikat yang menyatakan bahwa dunia saat ini unipolar atau dengan kata lain bertumpu pada dirinya. Rusia memandang bahwa dunia bertumpu pada banyak kekuatan sehingga memungkinkan bahwa salah satu kekuatan itu berasal dari negara Republik Federasi Rusia. Dengan asumsi seperti itu, Rusia pun secara mandiri dan berdiri di atas kakinya sendiri dalam mengurus kebutuhannya dan tidak bergantung terhadap negara-negara Barat ataupun Amerika Serikat.

Kebijakan peningkatan anggaran militer dan penguatan sistem keamanan dan pertahanan Rusia tidak terlepas dari perilaku Amerika Serikat maupun negara lain. Arogansi dan mudahnya intervensi yang dilakukan Amerika Serikat mengundang Rusia untuk ikut serta di dalamnya guna mengurangi pengaruh dominasi Amerika Serikat. Hal ini terlihat dengan kasus Ukraina dan Suriah, dimana Amerika Serikat ikut campur di dalamnya. Tentunya perilaku tersebut membuat Rusia tidak nyaman. Sehingga Rusia pun ingin memunculkan diri dan menunjukkan bahwa Rusia juga dapat ikut serta dalam panggung konflik internasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penguatan keamanan dan pertahanan Rusia terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni untuk mempertahankan kedaulatan negara Rusia sendiri. Adanya konflik seperti Crimea dan Ukraina membuat Rusia melihat bahwa sektor ini memang patut untuk difokuskan. Selain itu, agar situasi domestik juga bisa stabil. Adapun faktor eksternal sangat jelas terlihat, yakni dengan hadirnya negara-negara kuat dalam mendominasi dunia. Amerika Serikat merupakan salah satu alasan mengapa penguatan sistem keamanan dan pertahanan Rusia dilakukan. Tak bisa dipungkiri, Amerika Serikat yang merupakan teman sekaligus rival di masa lalu menjadi

faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan yang dilakukan Putin. Bahkan banyak yang berasumsi bahwa justru faktor eksternal lah yang menjadi faktor terbesar Rusia dalam melakukan berbagai kebijakan seperti bidang keamanan dan pertahanan. Tetapi faktor eksternal yang dimaksud disini ialah secara umum, bukan hanya Amerika Serikat saja, tetapi negara-negara lain semisal Eropa. Selain itu, keinginan untuk menjadi kekuatan dunia, yang juga membuat Rusia dibawah Putin ingin memperbaiki keadaan dalam negeri, baik secara ekonomi, sosial, politik dan militer. Rusia yakin setelah misi domestik itu tercapai, barulah Rusia bisa memiliki kekuatan untuk menjadi negara yang berperan secara positif bagi negara-negara lain (Bernstein, 2015).

B. Orientasi Kebijakan

Sebagai pewaris kekuatan Uni Soviet, sampai saat ini Rusia merasa penting untuk menjadi pemimpin dalam persemakmuran negara-negara bekas Uni Soviet atau CIS (Commonwealth of Independent State), Rusia selalu menekankan penguasaan (kontrol pengaruh) terhadap bekas wilayah Uni Soviet, baik yang dikawasan Eropa Timur maupun Asia Tengah. Wilayah Eropa-Asia (Eurasia) merupakan orientasi geografis (geopolitik) terpenting bagi Rusia. Rusia ingin mendapatkan kembali status great power dan menjadi oposisi dari unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Great power akan tercipta apabila Rusia menjalankan politik luar negeri yang waspada terhadap persaingan geopolitik dan mampu mempertahankan wilayah Eurasia.

Banyak fakta menunjukkan bahwa keamanan suatu negara bergantung pada efektifitas kebijakan pertahanan negara serta prinsip kemananan yang dianutnya. Pentingnya kebijakan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, kesejahteraan, stabilitas politik, ekonomi, sosial kultur, dan kepentingan militer. Tiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Penggunaan kekuatan militer khususnya ditentukan atas pandangan sejauh mana tingkat ancaman kepentingan nasional tersebut.

Kepentingan nasional ini yang kemudian menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan strategi kewanitaan National Security Strategic (NSS). Strategi kewanitaan Rusia menjelaskan bahwa Rusia menggunakan elemen-elemen negara yaitu militer, diplomasi, ekonomi, perjanjian internasional, dan alat lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Strategi kewanitaan membantu dalam mencegah ancaman dari luar. Strategi keamanan ini kemudian diwujudkan dalam sebuah dokumen dan yang paling penting yaitu doktrin militer. Kebijakan militer diwujudkan dalam kebijakan pertahanan yang didasarkan pada doktrin militer.

Doktrin militer Rusia dapat dibagi menjadi tiga kategori yang menyangkut kebijakan terhadap kekuatan militer dalam level internal Rusia yang meliputi angkatan darat, laut dan udara, serta kebijakan militer eksternal yang menyangkut perlakuan terhadap aliansi contohnya NATO. Doktrin militer Rusia berkonsentrasi pada perang dan pencegahannya, kekuatan bersenjata, persiapan negara dan angkatan bersenjata bila adanya agresi dan cara-cara untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah teritorial. Doktrin tersebut berisi dua pokok panduan, yang pertama menyangkut kebutuhan akan personel angkatan bersenjata dan peralatan militer, yang kedua tentang penanganan perang/angkatan bersenjata. Doktrin militer Rusia berisi tentang kekuatan militer dan pasukannya.

Perkembangan doktrin Rusia dimulai pada tahun 1990-an. Setelah pecahnya Uni Soviet, militer Rusia dilihat dalam pembentukan organisasi Commonwealth of Independent State (CIS), sebuah organisasi yang berisi dari negara-negara bekas Uni Soviet yang tentunya berada dibawah pengaruh Rusia. CIS merupakan kombinasi angkatan bersenjata dari masing-masing negara-negara anggotanya. Walaupun Rusia memiliki peran yang sangat kuat, namun organisasi ini tetap memiliki armada persenjataannya sendiri, terpisah dari angkatan bersenjata milik Rusia. Hal ini yang kemudian membuat Rusia merasa perlu untuk merumuskan sebuah doktrin militer yang disahkan pada tahun 1992 (<http://www.nti.org>,

2007). Doktrin inilah yang menjadi awal dari kebijakan keamanan Rusia, yang berbeda dari kebijakan pertahanan dan keamanan masa Uni Soviet.

Pada 1990-an, perkembangan kebijakan militer berisi tentang peran Rusia dalam penyelesaian konflik dan keterlibatannya dalam kerjasama militer dengan CIS (jaminan warga Rusia di negara CIS dan lainnya). Jika dibutuhkan dengan penggunaan kekuatan nuklir, penyebaran angkatan darat dan pasukan lain di luar wilayah Rusia, dan persepsi ancaman anti barat.

Secara spesifik, lahirnya doktrin tahun 1990 ini dipicu dengan memburuknya hubungan Rusia dengan barat yang ditandai dengan banyak intervensi barat atas urusan dalam negeri Rusia, terkait dengan adanya blok-blok militer dan aliansi, usaha untuk menghalangi kepentingan Rusia dalam pemecahan masalah keamanan internasional, serta skeptis tentang adanya musuh yang mengelilinginya. NATO dianggap sebagai musuh yang datang dari luar. Sepanjang tahun 1990 militer Rusia menyadari bahwa kemampuan angkatan bersenjata haruslah ditingkatkan sebab Rusia dihadapkan pada konflik bersenjata domestik maupun regional.

Pada tahun 2000, Putin memulai kebijakannya dengan menandatangani dokumen keamanan baru yang kemudian di publikasikan sebagai National Security Concept (NSC) pada Januari 2000 (Association, 2000). Ketika Vladimir Putin mengambil alih pemerintahan Rusia pada tahun 2000, ia menghadapi kondisi yang sangat lemah pada sektor militer. Mengetahui hal tersebut, Putin lalu mengambil tugas utamanya dalam menstabilkan militer Rusia.

Doktrin militer membentuk dasar dan bagian-bagian dari kebijakan keamanan nasional dan sebagai sebuah refleksi dari peristiwa masa lalu dan dapat mempersiapkan peristiwa yang akan datang melalui Analisa yang baik tentang perkembangan esensi dari doktrin militer tersebut. Lebih lanjut doktrin ini berisi tentang elemen-elemen yang dimaksimalkan oleh

Rusia dalam penggunaan militer untuk melawan ancaman terhadap negaranya. Doktrin militer Rusia dikeluarkan sebanyak 4 kali antara tahun 2000-2010. Doktrin ini berupa dasar dikeluarkannya kebijakan pertahanan Rusia dan upaya Rusia dalam mengatasi ancaman keamanan terhadap negaranya.

Doktrin militer yang pertama dikeluarkan pada tahun 2000, yaitu mengandung penekanan tentang pembalasan nuklir dalam kasus serangan nuklir. Pada April tahun 2000, Rusia mencantumkan bahwa ancaman keamanan Rusia berbentuk: Intervensi dalam urusan internal Federasi Rusia, adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan Rusia dalam menyelesaikan masalah keamanan internasional, perluasan blok-blok militer dan aliansi, penempatan tentara asing (tanpa sanksi DK PBB) untuk wilayah yang berbatasan dengan Rusia, dan mempersiapkan pasukan bersenjata Rusia yang dapat digunakan di wilayah strategis di luar wilayah Rusia (Blank, 2011). Lalu pada tahun 2003 Rusia menyebutkan bahwa ancaman berasal dari: ekspansi NATO dan negara-negara yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan NATO, adanya proliferasi senjata pemusnah massal (mass destructive weapon). Upaya Rusia untuk memastikan kemannyanya juga dituangkan dalam bentuk pemeliharaan kekuatan strategis agresi terhadap Rusia dan sekutunya serta pasukan Rusia dapat melakukan operasi bersenjata di daerah vital yang berhubungan dengan kepentingan nasional Rusia (Blank, 2011). Selanjutnya pada tahun 2004 mencantumkan bahwa ancaman berupa: perluasan blok militer (NATO), penempatan pasukan militer asing dalam wilayah kepentingan Rusia, upaya mengurangi peran Rusia dalam politik dan keamanan internasional, perluasan NATO ke timur, pengembangan WMD (weapon missile defence). Doktrin ini juga berisi tentang keinginan Rusia dalam menyaingi kepemimpinan global Amerika Serikat dan upaya untuk mendapatkan kedudukan guna menyebarkan pengaruhnya, keinginan menjadi kekuatan besar untuk menjadi superior dalam bidang militer serta reorganisasi struktur militer Rusia (Blank, 2011). Yang terakhir pada tahun 2010 berisi tentang kekuatan hukum sebagai

kebijakan negara dan secara prinsip menentukan keputusan dasar terutama dalam bidang militer. Doktrin 2010 melanjutkan strategi keamanan nasional 2009 yang menyebutkan NATO sebagai “bahaya” karena ekspansi terhadap negara yang berbatasan dengan Rusia. Bahaya lain mencakup pengembangan pertahanan rudal strategis dan presisi konvensional serangan senjata, termasuk rudal jelajah (Blank, 2011).

Selanjutnya juga terdapat lima prinsip dasar dari Doktrin pertahanan Rusia yang dideklarasikan oleh Presiden Medvedev adalah sebagai berikut (Indonesia, 2018):

1. Rusia mengakui keunggulan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang mendefinisikan hubungan antara bangsa-bangsa beradab. Kami akan membangun hubungan dengan negara-negara lain dalam kerangka prinsip-prinsip dan konsep hukum internasional.
2. Dunia harus multipolar. Sebuah tiang (kekuatan) tunggal tidak dapat diterima. Dominasi adalah sesuatu yang kita tidak bisa biarkan. Kita tidak bisa menerima tatanan dunia dimana satu negara membuat semua keputusan. Hal seperti ini membuat dunia tidak stabil dan terancam konflik.
3. Rusia tidak ingin konfrontasi dengan negara manapun. Rusia tidak berniat mengisolasi dirinya sendiri. Kami akan mengembangkan hubungan persahabatan dengan Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara lain sebanyak mungkin.
4. Melindungi kehidupan dan martabat warga negara kita, di manapun mereka mungkin berada merupakan prioritas yang utama untuk negara kita. Keputusan kebijakan luar negeri kita akan didasarkan pada kebutuhan ini. Kami juga akan melindungi kepentingan komunitas bisnis kami di luar

negeri. Ini harus jelas bagi semua bahwa kami akan menanggapi semua tindakan agresif yang dilakukan terhadap kita.

5. Seperti halnya dengan negara lain, ada wilayah-wilayah di mana Rusia telah memiliki “kepentingan istimewa”. Yang dimaksud adalah negara-negara yang memiliki hubungan sejarah khusus dan terikat bersama sebagai teman dan tetangga yang baik. Kami akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah tersebut dan membangun hubungan yang baik pula.

Berikut beberapa organisasi militer yang melibatkan Rusia dan Negara-negara tetangganya.

Table 2 Organisasi Militer Rusia (S.G. Luzyanin, 2008)

Nama Organisasi	Tahun Dibentuk	Negara anggota	Bidang	Orientasi
CIS (Commonwealth of Independent State)	8 Desember 1991	11 negara (setelah Ukraina dan Georgia mengundurkan diri) dan 1 negara pengamat (Mongolia)	Politik-ekonomi-militer	Integrasi, pro-Rusia
Organisasi Pakta Pertahanan Kolektif (Organizatsiya dogovora o kolektivnoy bezopasnosti-ODKB)	23 September 2003	Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgizia, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan	Militer (organ militer CIS)	Pro-Rusia
Shanghai Cooperation	15 Juni 2001	Cina, Rusia, Tadjikista	Militer	Pro-Rusia

Organisation (Shanghayskoe WOC)		n,Kirgiszia,Uzb ekistan, Kazakhstan, kecuali Uzbekistan, kelima negaradiatas tergabung dalam Shanghai-five		
EURAZEC	10 oktober 2000	Belorusia,Kaza khstan, Kirgiszia, Rusia, Tadjikistan,dan Uzbekistan. Negara pengamat: Moldavia, Ukraina, dan Armenia	Ekonomi	Pro-Rusia
GUAAM (Georgia, Ukraina, Uzbekistan, Armenia, Moldavia	1997	Georgia, Ukraina, Uzbekistan,Aze rbaijan, Moldavia, Azerbaijan keluar tahun 1999, sehingga namanya menjadi GUAM	Ekonomi- Politik	Pro-Barat
Ruang Ekonomi Tunggal	19 sep 2003	Rusia, Belorusia, Ukraina,Kazakh	Ekonomi	Pro-Rusia

(Yedinoe ekonomicheskoye prostranstvo-EEP)		stan, Sejak naiknya Viktor Yushenko menjadi Presiden, Ukraina membatasi keikutsertaan dalam organisasi ini.		
Proyek Uni Eurasia	Dalam proses pembentukan	Belarusia, Kazakhstan, Kirgizia, Rusia dan Tadjikistan	Politik, Ekonomi, militer, humaniora, budaya	Pro-Rusia
Pemerintahan Uni-Rusia-Belarusia Reintegrasi-	26 januari 2000	Rusia-Belarusia	Politik, hukum, ekonomi, sosial, humaniora, dll	Pro Rusia

C. Tujuan Kebijakan

Doktrin militer Rusia (tahun 2000) tampaknya menjadi upaya Rusia serius untuk mendefinisikan kembali tatanan internasional. Melalui Doktrin militer, Rusia ingin mengklaim kembali statusnya sebagai negara adidaya dan penyeimbang kepentingan di wilayah dalam sistem mandala Eropa. Jika melihat dari isi Doktrin militer di atas, dapat dilihat bahwa Rusia ingin adanya pembagian pengaruh yang tidak hanya didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat dan para sekutunya. Rusia berupaya untuk ikut serta dalam unjuk kekuatan dalam kancah internasional.

Dalam Orenburg pada tanggal 26 September 2008, Presiden Rusia Dmitry Medvedev bertemu dengan komandan distrik militer, dalam pertemuan itu, tercapai 5 visi dalam upaya mereformasi peralatan konvensional, yaitu (McDermott, 2011):

1. Meningkatkan organisasi dan struktur kekuatan dengan mengubah semua semua divisi dan brigade untuk brigade kesiapan permanen, menghapuskan prinsip mobilisasi massa dan meninggalkan sistem berbasis divisi.
2. Meningkatkan efisiensi dan kontrol keseluruhan komando.
3. Meningkatkan sistem pelatihan personel, termasuk pendidikan militer dan ilmu militer.
4. Melengkapi angkatan bersenjata dengan sistem senjata terbaru dan asset intelijen, terutama teknologi tinggi, dalam rangka untuk "mencapai superioritas angkatan udara, memberikan serangan presisi pada angkatan darat dan target maritim, dan memastikan penyebaran kekuatan operasional".
5. Meningkatkan status sosial personel militer, termasuk membayar dan tunjangan, perumahan, dan kondisi kehidupan sehari-hari serta analisis yang cermat tentang struktur asing, termasuk NATO.